

Yang terhormat,

Bapak Ketua Majelis Hakim,

Terima kasih banyak, yang telah memberi saya waktu untuk menyampaikan permasalahan yang kami hadapi.

Nama saya Ali Amran. Saya dirahirkan tgl. 31 Desember 1957 di desa Tanjung Alai, kecamatan XIII Koto Kampar, kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Republik Indonesia. Saya paling bungsu dalam 4 saudara, 2 kakak laki-laki saya meninggal dunia, lalu sekarang kami berdua kakak perempuan dan saya. Ayah saya petani, punya kebun karet 15 ha. Dalam desa, dia punya kebun karet lebih luas dari pada yang lainnya. Ibu saya ibu rumah tangga.

Setelah saya tamat SD di Tanjung Alai, saya berhenti sekolah dan mulai membantu pekerja di kebun karet ayah saya, karena ayah saya sudah tua. Waktu itu saya sudah mampu bekerja sendiri. Pada tahun 1980 saya menikah dengan istri saya dari desa yang sama, dan tinggal dengan keluarga istri saya. Keluarga istri punya kebun karet 2 ha, kebun jeruk 1 ha, 8 kambing dan 2 karabau. Ini biasa bagi hidup masyarakat. Anak saya 3 orang, laki-laki, perempuan dan laki-laki. Sejak tahun 2007, setelah 2 kakak laki-laki saya meninggal dunia, saya menjadi Ninikmamak dalam suku Mandailin.

Tentang bangunan waduk Koto-Panjang, saya tahu waktu pejabat pemerintah local berkeliling desa sambil memberi tahu " Jangan bangun rumah baru dan baik dari sekarang," dengan berbunyi gong. Ini 2 tahun sebelum mulai dibangun waduknya. Saya baru pertamakali hadir pertemuan untuk perwakilan pemuda-pemudi di kantor kepala desa. 25 pemuda-pemudi hadir. Dalam pertemuan, 6 mahasiswa dari Universitas Andalas dari luar desa, kepala desa, tokoh masyarakat dari dalam desa dll, datang. Waktu itu mahasiswa menjelaskan bahwa penduduk yang punya tanah harus daftar. Lalu mereka bertanya bahwa 1 karung beras untuk berapa hari, berapa air perlu untuk satu hari dll. Setelah itu, masih ada pertemuan berbagai level. Saya pernah ikut meninjau waduk di Siguragura di Medan.

Ada pertemuan penjelasan tersebut, tetapi hanya Ninikmamak, kepala desa, pejabat saja bisa bertandatangan di surat kesetujuan memindahkan desa seluruhnya. Waktu itu hanya kakak laki-laki yang Ninikmamak dalam keluarga saya menandatangani. Setelah pemindahannya diputuskan, masing-masing diminta harus ditandatangani di surat pendaftaran tanah. Tanah saya dinilai seharga Rp.300,000,(Rp.30/m²). Tetapi paling sedihnya rumah permanen, 7m x 9m, dinilai hanya Rp. 6,800,000. Saya tidak puas dengan bernilai ini, tetapi penandatangan harus secara diam. Waktu itu jaman Presiden Suharto, kalau lawan pemerintah, langsung tentara

muncul. Karena membahayakan jiwa, kami tidak bisa melawan sama sekali, hanya ikut saja, tidak ada cara lain.

Saya pindah ke desa sekarang bulan Oktober 1994. Desa baru adalah 18 km dari desa lama. Sampai ke desa jalannya aspal, tetapi dalam desa tidak ada jalan yang diaspal, dan susah ketemu rumah sendiri karena lokasinya terpisah-pisah. Dalam 313 kepala keluarga yang bersama pindah, setengah keluarga tidak bisa menemukan rumah sendiri. Akhirnya menginap di kantor imigrasi. Barang-barangnya diletakan di tikar di depan kantor. Kantor itu adalah bangunan kecil, 6m x 6m, atapnya dipakai bahan asbest. Masyarakatnya menginap sama-sama, dan barang barang juga basah karena hujan. Saya berusaha mencari rumah sendiri, akhirnya menemukan setelah 2 hari.

Rumah baru adalah kondisi sangat buruk. Kalau saya injak lantai, rusak, tidak ada dapur, toilet, lampu dan air bersih tidak dapat. Atapnya seharusnya seng, tetapi ternyata asbest. Sangat kurang puas, tetapi terpaksa meginap disitu saja karena tidak ada tempat lain. Supaya bisa tinggal disitu, membeli semen 6 sak (Rp.2,500/sak), minta orang (upahnya Rp.50,000/hari) selama satu minggu, lalu membuat lantai baru. Kemudian saya memperbaiki dinding dll, dengan uang ganti rugi.

Menurut janji pemerintah, waktu kami pindah kebun karet sudah siap dipanen tetapi samasekali tidak. Selama ini kami dapat bantuan; beras, minyak, ikan asing dll., tetapi sering mutu berasnya jelek, dan ikan asingnya sudah busuk dan tidak bisa dimakan. Jangka waktu bantuannya, janjinya, 2 setengah tahun, tetapi diperpendekkan sampai 1 setengah tahun. Oleh karena itu ganti rugi yang dapat waktu pindah rumah, sudah dihabiskan selama 3 tahun. Lalu kami tahan hidup sehari-hari ambil karet dari pohon karet di desa lama dan ambil ikan di danau.

Masyarakat marah dengan situasi ini, lalu 8 kepala desa bersama menuntut Gubernur di Riau, dan menyampaikan situasi tentang kesulitan masyarakat kepada Menteri Transmigrasi di pemerintah pusat. Akibatnya bantuan dari pemerintah mulai dari tahun 2000. Bantuan itu adalah 800 pohon karet/keluarga. Akhirnya kami bisa menanam pohon karet di kebun kami. Tetapi makan waktu 4 tahun sampai panen. Tahun 2001, kira kira 60 pemuda-pemudi pergi ke Gubernur dan minta perbaiki jalan dan air bersih. Akibatnya jalannya sedikit diperbaiki, tetapi kami masih harus membeli air bersih sampai sekarang, karena instalasi PAM tidak jalan. Rumah saya bayar Rp.40,000 satu bulan untuk air bersih.

Paling berat ekonomi adalah ongkos untuk pendidikan. Karena ekonominya kurang, anak

sulung saya tamat SMP, anak laki-laki kedua tamat SMA saja. Karena istri saya mulai bekerja, anak ketiga laki-laki bisa kuliah di Universitas Riau. Untuk anak ini saya mengirim uang Rp.1.600.000 setiap bulan. Berat sekali bagi saya. Dalam desa saya, banyak orang punya hutang di bank dengan jaminan surat hak tanah supaya anak-anak bisa kirim ke SMA atau universitas.

Kami, orang miskin, semua dapat kartu dari pemerintah dalam system bantuan kesehatan. Kartu bagi orang paling miskin bisa dipakai seluruh Indonesia, 20% dari penduduk desa saya dapat. 70% penduduk desa saya dapat kartu yang bisa dipakai dalam Provinsi Riau. 10% penduduk desa saya dapat kartu yang dipakai di dalam desa. Akhir-akhir ini, produksi dari kebun karet tambah dan situasi hidup saya lebih baik, tetapi masih sangat sulit sehari-hari karena hasilnya tergantung cuacanya.

Saya sangat kecewa dengan putusan pengadilan negeri. Dulu anggota parliamen dari Jepang mengunjungi desa saya dan meninjau situasi desa saya selama 30 menit. Salah satu anggota bertanya kepada Ibu Nursari yang punya atap dengan asbest, "Apakah anda tidak bisa ganti atapnya?" Ibu Nursari menjawab, "Saya tidak bisa karena saya tidak punya uang. Sulit makan sehari-hari." Waktu itu saya ada sebelahnya dan bilang kepada anggota dari Jepang, "Sekarang pun, penduduk desa ini hidupnya sulit sekali." Saya yakin anggota parliamen dari Jepang memahami benar situasi kami. Walaupun mereka melihat situasinya jelas, saya tidak paham dengan putusan Pengadilan Negeri gagal total.

Tetapi hakim-hakim di Pengadilan Tinggi memberi kesempatan kepada kami. Saya sangat berterima kasih di atas kesempatan ini dan pendapat saya tolong didengarkan. Saya minta tolong hakim-hakim di Pengadilan Tinggi berpikir dari posisi pihak kami. Saya ingin sekali para hakim-hakim memahami kesensaraan kami selama ini dan akan dapat memetuskan secara adil. Terima kasih banyak.